

PENDAMPINGAN DI SEKRETARIAT DPRD KOTA SURABAYA SEBAGAI SISTEM PENDUKUNG TUGAS PENGAWASAN

Anita Tri Agustin¹, Endang Indartuti²

¹Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

anitaagustin056@gmail.com, endangindartuti@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya (disingkat DPRD Kota Surabaya atau DPRD Surabaya) adalah sebuah lembaga legislatif di lingkup Kota Surabaya , Provinsi Jawa Timur , Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD sebagai sistem pendukung tugas pengawasan, evaluasi menjadi alat penting untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang ada. Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Sekretariat DPRD Kota Surabaya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi . Teknik analisis data digunakan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berikut tahapan kegiatan magang penulis di Kantor Sekretariat DPRD Kota Surabaya. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi perbaikan dan pengembangan sumber daya agar pengawasan DPRD lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan lingkungan politik dan teknologi. Sekretariat DPRD merupakan bagian integral dari institusi DPRD yang bertanggung jawab menyelenggarakan berbagai aktivitas administratif dan teknis untuk mendukung tugas-tugas legislasi dan pengawasan. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk melakukan evaluasi kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai sistem pendukung dalam melaksanakan tugas pengawasan. Penelitian akan mencakup analisis mendalam terhadap bagaimana Sekretariat DPRD telah menjalankan fungsi pendukung, termasuk pengelolaan informasi, perencanaan, dan koordinasi yang relevan dengan proses pengawasan DPRD.

Kata kunci : Efektivitas, Evaluasi, DPRD

ABSTRACT

The Surabaya City Regional People's Representative Council (abbreviated as Surabaya City DPRD or Surabaya DPRD) is a unicameral legislative institution within the city of Surabaya, East Java Province, Indonesia. In order to improve the performance of the DPRD Secretariat as a support system for supervisory duties, evaluation is an important tool for identifying existing strengths and weaknesses. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. The location of this research was carried out at the Surabaya City DPRD Secretariat Office. Data collection techniques are carried out by means of interviews, documentation and observation. Data analysis techniques are used with data reduction, data presentation and drawing conclusions. The following are the stages of a writer's internship at the Surabaya City DPRD Secretariat Office. The results of this evaluation can be used as a basis for developing recommendations for improvement and development of resources so that DPRD supervision is more efficient, effective and responsive to community needs and the demands of developments in the political and technological environment. The DPRD Secretariat is an integral part of the DPRD institution which is responsible for carrying out various administrative and technical activities to support legislative and supervisory tasks. The aim of this research is to evaluate the performance of the Regional People's Representative Council (DPRD) Secretariat as a support system in carrying out supervisory duties. The research will include an in-depth analysis of how the DPRD Secretariat has carried out supporting functions, including information management, planning and coordination relevant to the DPRD oversight process.

Keywords : Effectiveness, Evaluation, DPRD

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya (disingkat DPRD Kota Surabaya atau DPRD Surabaya) adalah sebuah lembaga legislatif unikameral do lingkup Kota Surabaya , Provinsi Jawa Timur , Indonesia . Berdasarkan daftar terbuka dari partai pada pemilihan umum daerah lima tahun sekali , dewan yang terpilih berjumlah 50 anggota . Pemilihan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serentak

seluruh Indonesia Kedudukan jabatan yang sekarang ialah hasil pemilihan umum pada tanggal 17 April 2019 dan dilantik pada tanggal 24 Agustus 2019. Dalam periode 2019-2024 ini beranggotakan 50 orang yang diisi oleh PDI Perjuangan (15 kursi) , PKB (5 kursi) , Partai Gerindra (5 kursi) , dan Partai Golkar (5 kursi) . Pimpinan DPRD Kota Surabaya periode 2019-2024 sekarang terdiri dari Adi Sutawidjono (Ketua) berasal dari PDI Perjuangan , Laila Mufdah (Wakil Ketua) berasal dari PKB , A.H. Thony (Wakil Ketua) berasal dari Gerindra , dan Reni Astuti (Wakil Ketua) yang berasal dari PKS . Pimpinan ini resmi menjabat semenjak tanggal 26 September 2019.

Peran pemerintah sebagai pelayan public tentunya memiliki beban tugas yang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan tupoksi atau Amanah yang telah diberikan. Segala bentuk tugas harus diselesaikan dan dikerjakan demikian maka, secara tidak langsung dari segi kinerjapun perlu adanya suatu pengawasan untuk menjaga keberlangsungan dan efektivitas, serta efisiensi keterlaksanaan tugas. Pada dasarnya melakukan penilaian terhadap seberapa jauh hasil kinerja yang telah dilakukan merupakan cara yang tepat untuk melihat apakah kinerja yang dilakukan dapat dikatakan baik. Maka dari itu salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengukur seberapa jauh suatu kinerja sampai dikatakan baik yaitu dengan melakukan evaluasi kinerja. Evaluasi sendiri oleh William N Durn diartikan sebagai bentuk penilaian terhadap hasil kinerja yang telah dilakukan. Evaluasi juga diartikan sebagai suatu kombinasi antara kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian serta perumusan masalah. Inilah mengapa seberapa jauh hasil kinerja pemerintah yang telah dilakukan menjadi suatu bahan penilaian untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanannya. Pemerintahan yang berdiri sebagai public services mau tidak mau harus berupaya memberikan hasil kinerja atau pelayanan terbaiknya demi terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut dengan good governance. Oleh karena itu, evaluasi kinerja perlu dilakukan guna menilai hasil kinerja yang dilakukan. Selain itu, evaluasi kinerja juga dapat digunakan sebagai sistem pengawasan. Sistem pengawasan terhadap segala bentuk kebijakan ataupun program daripada tupoksi masing-masing bidang, Lembaga ataupun instansi yang telah dilaksanakan.

Dalam konteks peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ialah representatif, maka kualitas kinerja DPR akan menjadi bahan koreksi oleh masyarakat. Maka dari itu kualitas kerja DPR harus benar-benar maksimal selaku suara dan wakil rakyat. Kemudian dalam pelaksanaannya kinerjanya DPR dibantu langsung oleh sekretariat DPR yang salah satu tugas fungsinya merupakan membantu DPR secara administrative. Dengan demikian maka hasil kinerja bagian administrative berpengaruh terhadap hasil atau kualitas kinerja DPR. Inilah mengapa di dalam pelaksanaan kinerja bagian kesekretariatan DPR perlu dilakukan suatu evaluasi kinerja. Yang nantinya tentunya digunakan sebagai bahan penilaian. Di zaman yang maju seperti ini, sangat dibutuhkan sekali instansi pemerintah atau swasta yang dapat menggerakkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dalam segi pangan, papan, ataupun papan yang tidak akan pernah berhenti dibutuhkan oleh umat manusia. Ketiga kebutuhan primer tersebut tentu dapat terpenuhi jika manusia memiliki penghasilan yang dapat bertanggung jawabkan kegunaannya. Bekerja merupakan syarat utama agar manusia dapat berproduksi dan memenuhi segala kebutuhannya. Disinilah mengapa instansi sangat dibutuhkan agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menukar energi dan pikirannya.

Bagian sekretariat DPR yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal administrasi, maka tentunya tupoksinya ialah melakukan pelayanan membantu dan mendukung tugas dan fungsi dari DPR. Berdasarkan Undang-Undang Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Maka jika dalam konteks pelaksanaan e-government tentunya sebagai pelayan administrasi DPR maka tuntutan akan penggunaan atau penerapan pemerintah dan pelayanan yang berbasis digital menjadi suatu keharusan yang harus diterapkan. Melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik tentunya dari segi kinerja akan lebih mudah ditangani dan dikerjakan. Terutama dalam hal pelayanan public. Kondisi tersebut akan jauh memberikan kualitas yang lebih efektif dan efisien terhadap pelayanan yang diberikan. Secara birokratispun masyarakat yang merupakan objek pelayanan akan merasa puas dan dimudahkan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD sebagai sistem pendukung tugas pengawasan, evaluasi menjadi alat penting untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang ada. Hasil evaluasi ini

dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi perbaikan dan pengembangan sumber daya agar pengawasan DPRD lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan lingkungan politik dan teknologi. Sekretariat DPRD merupakan bagian integral dari institusi DPRD yang bertanggung jawab menyelenggarakan berbagai aktivitas administratif dan teknis untuk mendukung tugas-tugas legislasi dan pengawasan. Dalam konteks ini, Sekretariat DPRD memiliki peran penting sebagai penunjang dalam mengorganisasi kegiatan pengawasan, menyediakan data dan informasi, serta mendukung proses penyusunan laporan hasil pengawasan. Evaluasi kinerja Sekretariat DPRD sebagai sistem pendukung tugas pengawasan juga perlu mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, seperti anggaran, tenaga kerja, dan teknologi informasi. Kekurangan dalam aspek-aspek ini dapat menghambat efisiensi dan efektivitas Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara optimal.

METODE PELAKSANAAN

Metode Penelitian yang telah dilaksanakan dalam kegiatan magang di Kantor Sekretariat DPRD Kota Surabaya pada bulan Juli sampai September tahun 2023. Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian berfokus pada data yang akan ditemukan, dikumpulkan, diorganisasikan dan dianalisis selama melakukan penelitiannya. Selain itu, orientasi penelitian dipahami sebagai bagian utama dari fokus yang meliputi pereduksian masalah yang akan diteliti agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika membahas atau mengkaji masalah pokok. Dalam pendapat lain, pendekatan kualitatif proses penelitian yang digunakan untuk menentukan keadaan alam seperti perbedaannya adalah suatu eksperimen, dimana peneliti adalah peneliti utama melalui analisis data induktif dan penekanan pada temuan penelitian Artinya, alih-alih menyimpulkan, itu adalah proses refleksi yang dimulai dari individu ke kelompok umum (Burta, 2018)

Fokus penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai sistem pendukung dalam melaksanakan tugas pengawasan. Penelitian akan mencakup analisis mendalam terhadap bagaimana Sekretariat DPRD telah menjalankan fungsi pendukung, termasuk pengelolaan informasi, perencanaan, dan koordinasi yang relevan dengan proses pengawasan DPRD. Evaluasi akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas dan efisiensi Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas pengawasan anggota DPRD, serta identifikasi terhadap kemungkinan perbaikan atau pengembangan sistem yang ada guna meningkatkan kinerja mereka dalam menjalankan peran krusial ini. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Sekretariat DPRD Kota Surabaya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data digunakan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berikut tahapan kegiatan magang penulis di Kantor Sekretariat DPRD Kota Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekretariat DPRD ialah salah satu komponen yang memiliki nilai atau value yang cukup krusial. Keberadaan sekretariat DPRD yang secara langsung membantu tugas-tugas daripada DPRD maka tentunya Ketika kinerja sekretariat DPRD tidak terlaksana dengan maksimal maka tentu saja DPRD-pun tidak akan maksimal dalam berperan sebagai perwakilan rakyat di dalam pemerintahan. Begitupun sebaliknya ketika kinerja para anggota dewan tidak maksimal maka sebagai bidang sekretariat yang mendukung dan membantu tugas DPRD juga tidak akan berjalan dengan maksimal. Dengan demikian maka keduanya harus saling menjaga konsistensi, komunikasi, serta hubungan yang baik sehingga semua pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Dalam konteks kinerja maka, untuk menilai atau menentukan bahwasanya suatu kinerja dikatakan bagus dan maksimal, maka diperlukan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja dimaksudkan untuk melihat, menilai, dan mengukur hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh bagian sekretariat DPRD.

A. Efektivitas Kinerja Sekretariat DPRD Surabaya

Untuk mencapai titik keberhasilan di dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan maka diperlukan suatu nilai atau value yang dapat dijadikan sebagai alat ukur. Dan alat ukur tersebut dapat dilihat dari efektivitas efektivitasnya terhadap pelaksanaan suatu program yang sedang berjalan ataupun yang telah selesai dilaksanakan. Dengan demikian didalam pelaksanaannya perlu adanya berbagai strategi yang harus dilakukan sehingga dalam menjalankan kinerjanya dapat berjalan dengan efektif. Definisi efektivitas menurut Siagian dalam (Mahardita, 2017) mengemukakan bahwa, efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya yang telah ditetapkan, artinya apakah pelaksanaan kerja suatu tugas dinilai baik atau tidak itu tergantung pada bilamana tugas itu diselesaikan, dan tidak terutama menjawab bagaimana cara menyelesaikan, melaksanakan, dan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk itu.

Maka dalam hal ini dapat dipahami bahwasanya tidak semua tugas dan fungsi yang telah diterima hanya dijalankan begitu saja tanpa adanya suatu strategi yang tepat untuk kemudian bisa sampai dikatakan efektif. Makna efektif sendiri diartikan sebagai barometer atau alat ukur tingkat keberhasilan terhadap suatu kebijakan ataupun program yang telah dijalankan. Dengan kata lain suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil ketika kebijakan tersebut dibentuk sebagai pemecahan masalah. Ketika suatu kebijakan yang dibentuk dapat menjawab semua permasalahan yang ada maka dapat dipastikan bahwa suatu kebijakan yang diambil tersebut berhasil. Dan ketika suatu kebijakan tersebut berhasil dijalankan maka kebijakan tersebut juga dapat dikatakan efektif.

Jika dalam konteks efektivitas Kinerja Sekretariat DPRD Surabaya maka untuk efektivitas efektivitas kinerja sekretariat adalah dengan dibentuknya beberapa peraturan atau aturan (SOP), pembagian jobdisk atau tugas fungsi pada masing-masing pegawai sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dimiliki. Melalui beberapa aturan yang dibuat tersebut diharapkan mampu mengendalikan kualitas kinerja para pegawai. Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Suharto selaku kepala bagian rapat peraturan - undangan menyebutkan bahwa salah satu faktor penting dalam menciptakan efektivitas kerja yang baik adalah melalui pengukuran pembagian kerja. Artinya *the right man in right place* menjadi kunci utama suatu organisasi dapat mewujudkan yang namanya efektivitas kinerja.

“ Jika kita berbicara mengenai efektivitas kinerja mba, maka kita harus berbicara terlebih dahulu mengenai tepat dalam pembagian kerja. Maksudnya adalah begini, jika kita ingin suatu pekerjaan dapat berjalan atau bekerja dengan baik, maka kita juga harus memberikan pekerjaan tersebut kepada ahlinya atau yang mampu dibidangnya. Sehingga teori the right man in right place dapat diterapkan dengan baik. Ketika kondisi tersebut dapat terpenuhi maka kedepannya akan enak. Secara tanggungjawab pekerjaanpun sudah pasti akan lebih terkontrol. Sebab kita menempatkan kebutuhan yang disesuaikan dengan keahliannya. Nah jika kondisi tersebut dikontekstualkan di bagian sekretariat DPRD Surabaya, maka saya rasa kami sudah menempatkan SDM yang ada pada bidang keahliannya masing-masing. Dengan demikian rasa saya itu sudah cukup menjawab bagaimana efektivitas kinerja mereka.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya ketepatan kemampuan dengan kebutuhan yang diperlukan adalah kunci terbentuknya efektivitas kinerja yang baik dan terkendali. Dengan begitu pembagian kerja dapat terbagi secara merata dan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Selain dari hasil wawancara yang telah dilakukan juga menyebutkan bahwasanya tingkat konsistensi para pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pengembangan berbagai inovasi pelayanan juga menjadi salah satu upaya mewujudkan efektivitas kinerja.

B. Efisiensi Kinerja Sekretariat DPRD Surabaya

Efisiensi dimaknai sebagai bentuk perbandingan antara tujuan dan hasil yang telah dicapai. Jika dalam dunia bisnis efisiensi dapat disebut sebagai proses meminimalkan jumlah biaya produksi akan tetapi tetap memaksimalkan hasilnya. Jika berbicara mengenai efisiensi kinerja sekretariat DPRD, maka dapat dipahami melalui tupoksi daripada bagian sekretariat DPRD dimana tugas dan fungsi dari bagian sekretariat DPRD yang membantu tugas anggota DPRD dan pimpinan. Semakin banyak intensitas kegiatan DPRD menandakan semakin banyak tugas yang harus diselesaikan oleh anggota DPRD. Definisi efisiensi menurut Sedarmayanti dalam (Mahardita, 2017) Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Kondisi tersebut kemudian juga harus diikuti dengan buruknya pendayaan sumber daya aparatur sekretariat. Oleh karena tugas sekretariat DPRD adalah membantu atau mensupport tugas dari DPRD, maka tentunya apa yang menjadi kegiatan atas tugas DPRD juga merupakan tugas yang harus diselesaikan oleh sekretariat DPRD.

Maka secara praktis dapat dipahami bahwa tingkat efisiensi kinerja dapat dicapai ketika hasil kinerja yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Dan pencapaian kinerja yang baik dapat dipengaruhi oleh buruknya dayaan sumber daya yang ada. selain itu setiap orang yang telah diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Artinya ketika pendayaan sumber daya yang ada tidak dibarengi dengan tingkat tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi, maka tentunya hasil kinerja yang dilakukan tidak akan efisien.

“ Efisiensi itu dapat diwujudkan ketika apa yang kita kerjakan tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran. Itu efisien kalau menurut saya. Jadi kalau sampean tanya terkait efisiensi kerja di sekretariat DPRD Surabaya khususnya, ya saya rasa efisiensi kinerja sekretariat DPRD sejauh ini sudah cukup baik. Kenapa karena kita disini sangat demikian, saya berkata memaksimalkan akan menggunakan sumber daya aparatur yang ada. Yang dimana sudah di posisikan pada kemampuan dan keahlian masing - masing. Jadi kita mengerjakan tugas masing - masing berdasarkan timeline yang sudah ditentukan juga. Tidak boleh molor. Sehingga pekerjaan dapat tercover dengan baik mba”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya efisiensi kinerja pada sekretariat DPRD Surabaya sudah cukup baik. Dimana beberapa kegiatan atau agenda DPRD dapat berjalan sebagaimana timeline yang telah ditentukan. Dengan demikian maka dalam melaksanakan tugas-tugas tidak melebihi jatah atau waktu yang sudah diberikan. Sehingga pekerjaan tidak molor dan tertunda tunda.

1. Faktor Penghambat Kinerja Sekretariat DPRD Surabaya

Faktor penghambat menjadi salah satu kendala yang cukup krusial dalam pelaksanaan suatu program kebijakan. Adanya suatu hambatan dalam pelaksanaan suatu program akan menghambat kinerja yang dilakukan. Dengan demikian maka hambatan – hambatan tersebut harus segera diistilkan agar kinerja yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Inilah mengapa diperlukan adanya evaluasi kinerja. Yang salah satu tujuannya adalah untuk melihat seberapa banyak kendala atau hambatan yang terjadi. Ketika ditemukan hambatan maka hambatan tersebut akan segera diberikan pemecahan masalah. Dengan begitu dapat mengoptimalkan hasil kinerja yang dikerjakan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing.

Sedangkan pada penelitian ini peneliti menemukan beberapa kendala yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara bersama bapak Mutandar Rachman, SH, MM selaku kepala Sekretariat DPRD Kota Surabaya. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan setidaknya dua hambatan dalam kinerja sekretariat DPRD Kota Surabaya, yaitu sebagai berikut:

A. Tingkat Kedisiplinan Anggota Dalam Menghadiri Sidang / Rapat Rendah.

Tingkat disiplinitas anggota DPRD yang rendah dalam menghadiri rapat akan mempengaruhi tugas dan fungsi bagian sekretariat DPRD dalam memfasilitasi publikasi rapat DPRD. Oleh karena tingkat disiplinitas anggota dalam menghadiri rapat rendah. Maka bagian sekretariat pun tidak bisa melakukan publikasi kegiatan rapat secara gamblang. Dari hasil observasi peneliti selama melakukan penelitian. Peneliti menemukan bahwa tidak sedikit anggota DPRD yang tidak mengikuti kegiatan rapat. Tidak sedikit dari mereka yang hanya melakukan absensi tetapi tidak mengikuti kegiatan atau proses rapat. Menurut penjelasan dari hasil wawancara bersama Kepala Bagian Rapat dan Perundang-Undangan Daerah DPRD Kota Surabaya yakni bapak Suharto, AMP., SH., S.Sos., M., T menyebutkan bahwa:

"Jadi begini mas, kalau untuk kegiatan rapat memang terkadang ruangan rapat tidak terisi penuh sesuai dengan jumlah anggota DPRD yang ada. Ini karena ada beberapa hal juga. Seperti halnya pada saat kegiatan rapat ada kunjungan kerja, atau tugas lain yang juga harus dilaksanakan. Jadi mereka benar melakukan absensi akan tetapi mereka ada kegiatan lain yang juga tidak bisa ditinggalkan. Tapi bisa saya pastikan kondisi tersebut jarang sekali terjadi. Kalaupun ada jadwal yang bentrok rata-rata anggota akan mengikuti setengah perjalanan rapat yang sedang dilaksanakan. Sehingga mereka tidak mengikuti rapat sampai akhir."

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwasanya tingkat disiplinitas anggota DPRD berpengaruh terhadap tugas dan fungsi bagian sekretariat DPRD. Dengan terhambatnya tugas dan fungsi maka sekretariat DPRD tidak dapat melaksanakan fungsi dalam memberikan fasilitas publikasi rapat DPRD. Dengan demikian maka kondisi tersebut akan berpengaruh langsung pada hasil kinerja bagian sekretariat. Inilah mengapa semua elemen yang ada harus saling bertanggung jawab atas tugas dan fungsi masing-masing. Sehingga sistem atau pengaturan urusan yang menjadi tanggungjawabnya dapat dilaksanakan dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil Kajian Evaluasi Kinerja Pada Bagian Sekretariat DPRD Kota Surabaya Sebagai Tugas Dan Fungsi Pengawasan menunjukkan bahwa secara praktis beberapa tugas dan fungsi dari bagian sekretariat tidak dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh ketidakmaksimalan hasil kinerja yang dilakukan oleh anggota DPRD. Adapun tugas dan fungsi yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal adalah pada bagian publikasi hasil rapat anggota DPRD. Kondisi tersebut terjadi akibat banyak anggota DPRD yang tidak mengikuti proses rapat yang berlangsung. Sebagian besar dari mereka hanya mengisi daftar hadir lalu meninggalkan rapat. Adapun alasan yang diberikan adalah sebagian dari mereka sedang ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Dengan kondisi seperti itu tentunya kapasitas yang tersedia di dalam ruang rapat sangat tidak sesuai dengan jumlah anggota dewan yang menghadiri kegiatan rapat tersebut. Seharusnya kondisi seperti itu tidak seharusnya terjadi, karena semua agenda atau kegiatan anggota dewan sudah terjadwal. Sehingga ketika terdapat kegiatan rapat seluruh anggota dewan dapat hadir secara keseluruhan. Inilah mengapa perlu adanya pengendalian dan perbaikan disiplinitas baik kepada para anggota dewan ataupun kepada bagian sekretariat DPRD. Berdasarkan kondisi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas maka dapat menggambarkan bahwasanya di dalam pelaksanaan kerja baik dari bagian sekretariat DPRD ataupun

anggota DPRD sendiri harus saling mendukung satu sama lain. Artinya keduanya harus bekerja secara maksimal, segala bentuk tugas fungsi harus terlaksana dengan baik. Sehingga semuanya dapat memberikan hasil kinerja yang maksimal. Ketika salah satu dari mereka tidak dapat bekerja secara maksimal maka kinerja yang dihasilkan tidak akan bisa maksimal.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka terdapat beberapa saran dalam evaluasi kinerja bagian sekretariat DPRD Kota Surabaya, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Perlunya meningkatkan disiplinitas baik kepada anggota dewan ataupun kepada bagian sekretariat DPRD. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil kinerja yang dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi masing – masing.
2. Perlunya melakukan pelatihan penggunaan teknologi digital Khususnya kepada staf senior, yang secara praktis kurang memahami dengan sistem teknologi digital yang diterapkan. Dengan melakukan banyak pelatihan maka diharapkan secara kemampuan dapat meningkat sehingga tidak ada kesenjangan keabilitas antara staf senior dengan staf muda yang notabennya lebih canggih terhadap sistem teknologi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Burta, F. S. (2018). *Pengaruh Lingkungan Sekolah terhadap Pembentukan Karakter Anak pada Mata Pelajaran Pkn. 1*, 430–439.
- Mahardita, H. R. (2017). Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 133–144.
[https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/Hayuning Rizki Mahardita \(02-10-17-02-37-33\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/Hayuning Rizki Mahardita (02-10-17-02-37-33).pdf)